

Krisis Pangan dalam Perspektif Sejarah

PERINGATAN Hari Pangan, beberapa hari lalu baru saja diperingati. Sekalipun dihadiri Presiden Joko Widodo, perhelatan agung ini bukan seremonial dan reuni pejabat. Peringatan ini merupakan momentum melesakkan pemahaman betapa pentingnya aspek ketersediaan pangan bagi kehidupan masyarakat dan negara.

Mulai Presiden Sukarno sampai Presiden Jokowi emoh meremehkan ketersediaan beras. Diakui atau tidak, citra positif, kewibawaan, dan kekuasaan seorang pemimpin memang diperparahkan oleh pasokan buliran beras. Publik diyakinkan pula bahwa tak ada kesengsaraan seperti kelaparan dan kekurangan pangan. Penguasa dipastikan gigih merawat mitos Indonesia negeri loh jinawi.

Diguncang

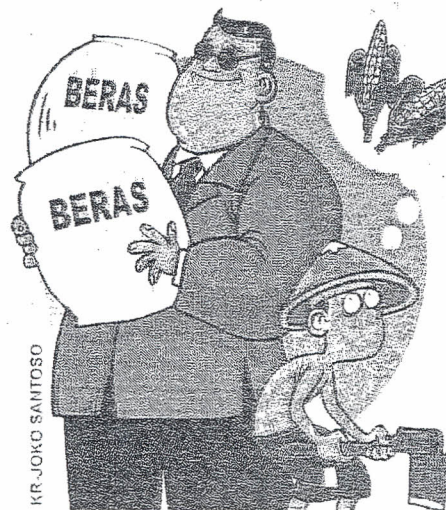
... Ditelisik dari arsip sejarah, terpotret wilayah Hindia Belanda pernah diguncang persoalan pangan berlarut-larut. Dan, orang yang kali pertama merasakan petaka ini adalah kaum perempuan yang *kubina saba pawon*. Jurnalis koran *Djawi Hisworo* edisi 25 September 1918 mengabarkan kondisi menyedihkan itu. Berikut ini kutipannya: "Beberapa minggu yang lalu di setiap harinya hingga kini, selalu terdengar teriakan perempuan-perempuan kampung dari golongan bawah (miskin), dikarenakan harga beras eceran di warung atau di pasar semakin mahal harganya. Sehingga beras yang sebelumnya hanya berharga 10-12 sen, sekarang mencapai harga 18-20 sen. Melihat keadaan sekarang ini, nyata-lah sudah bahwa aturan negara yang menentukan harga beras yang terjual tiap hari, sekarang menjadi sia-sia." (tulisan disesuaikan EYD).

Lantaran pemerintah kolonial dan raja pribumi tak segera mampu merampungkan masalah perut ini, akhirnya gambaran *Vorstelanden* sebagai 'surganya Hindia Belanda' runtuk. Penguasa tak berkutik mendapati dampak dahsyat dari larang pangan ini. Wartawan *Djawi Hisworo* (1/3/1918) melaporkan, selama seminggu lebih terdapat 8 lelaki dari sebuah desa di Pracimantoro, Wonogiri datang ke *negari* guna menemui priayi yang telah dikenalnya.

Heri Priyatmoko

Rombongan *tiyang ndusun* ini bertanya bagaimana caranya menjadi kuli kontrak Dehi. Mereka ingin menjadi kuli kontrak bukan atas paksaan orang lain, melainkan lantaran mahalnya makanan dan sempitnya sumber mata pencaharian saat ini.

Sekadar untuk mencukupi kebutuhan perut, kaum *krama* (rakyat jelata) itu dengan hati perih rela berpisah dengan keluarga. Mahalnya



harga beras di pasar dan warung bukan cuma disebabkan kemarau panjang, serangan wereng, dan permaman tengkulak, namun juga kelecikan pedagang.

Bukan hanya residen yang akhirnya turut tanggan, pemerintah kerajaan juga ikut menyematkan kawulunya yang *kaliren* (kelaparan) meski bersifat sementara. *Serat Sebarunijaya Kusuma* mengisahkan, *Serati* ini kapang *selasin* (Paku Buwans X) bersama isurnya dibantu para pereinpuan abdi dalam 'membuka lapak' di Sitinggil. Raja duduk di kursi menghadap beberapa tenggok berisikan beras, dan Nyai Lurah bersila di hadapannya. Masyarakat berbondong-bondong hendak membeli beras. Di hadapan

raja, para kawula duduk berjengkok serta menyembah. Tetap ada transaksi di sana, namun tidak berlumur pamrih. Beras dapat dibawa pulang dengan harga semurah mungkin. Senyum pun mengembang di bibir warga. Tidak lupa terima kasih dihaturkan kepada junjungannya yang hadir bak dewa penyelamat di tengah kesusahan menyergap.

Komoditas Strategis

Politik beras yang ditempuh penguasa kian meyakinkan kita betapa beras memang komoditas yang sangat strategis. Setiap penguasa tidak bisa mengabaikan komoditas ini selama makanan pokok kita adalah beras. Celakanya, beras kadung dipandang memiliki citra sosial tinggi dan merepresentasikan identitas bangsa. Sementara itu bahan pangan nonberas seperti jagung atau sagu dipandang identik dengan kemiskinan. Ketahanan pangan lebih dimaknai dan diarahkan pada sisi produksi beras, sementara sisi konsumsi yang mengacu pada keanekaragaman kultural diabaikan.

Maka dari itu, pemerintah melalui peringatan di Boyolali itu harus meneguhkan komitmennya terhadap diversifikasi pangan, pengolahan pangan dan kultur pangan. Ketiga aspek ini mestinya bukan hanya jadi bagian penting dalam konsep reformasi pembangunan yang dilakukan di tingkat daerah, namun juga perlu digulirkan menjadi wacana publik. Upaya menggulirkannya tentu tidak sederhana. Bantuan meroka yang bergerak pada *voluntary sector* (LSM, profesional, intelektual), media massa dan para politisi dibutuhkan sekali. Ya, pangan dan kekuasaan laksana gigi dan gusi, sulit dilepaskan. D - e

*) Heri Priyatmoko MA, Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com